



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: I (satu)
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2020.
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyampaian Laporan Hasil Panja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR RI 2. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019 3. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 43 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.20 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Penyampaian Hasil Laporan Panja Pembelajaran Jarak Jauh

Komisi X DPR RI menyerahkan Laporan Hasil Panja Pembelajaran Jarak Jauh kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Pembelajaran Jarak Jauh dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021.

B. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2019

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI atas capaian Opini BPK Tahun 2019 dengan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 5 tahun berturut-turut (2015-2019). Selanjutnya meminta Kemendikbud RI untuk mempertahankan capaian prestasi ini pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.
2. Berdasarkan dokumen LKPP Tahun 2019, Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2019 di atas APBN untuk Kemendikbud RI sebesar 101,39% dan Kemenristekdikti RI sebesar 110,6%.
3. Terhadap LKPP Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI TA 2019, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melengkapi paparan mengenai hal-hal pokok dalam LKPP, khususnya terkait bidang pendidikan tinggi antara lain mengenai penggunaan PNBPN, BLU, dan Hibah

C. Lain-lain

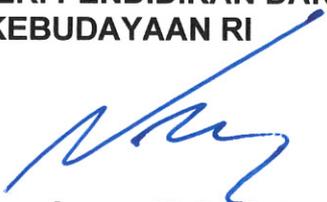
1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan adanya landasan hukum atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dan mengomunikasikannya dengan Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan tidak adanya permasalahan hukum atas hibah "Merdeka Belajar" dari PT. Cikal kepada Kemendikbud RI.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar kurikulum darurat dalam masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik, dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menyediakan dan memastikan distribusi modul pembelajaran untuk peserta didik, pendidik dan orangtua khususnya daerah yang tidak memiliki jaringan listrik, internet dan 3T serta layanan untuk peserta didik difabel.
5. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk membuat kajian mengenai pembukaan sekolah pada zona hijau dan kuning dengan mempertimbangkan permasalahan setiap satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
6. Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan Kemendikbud RI terkait pemberian subsidi kuota internet bagi peserta didik, pendidik, mahasiswa dan dosen, dengan catatan dilakukan pengawasan secara ketat agar tepat sasaran dan tepat jumlah.

7. Untuk satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik berada di daerah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI memperluas penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, serta skema penambahan dana untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
8. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memperhatikan tenaga honorer dalam kebijakan pemberian tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan dosen dan tunjangan guru besar.
9. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dalam waktu dekat untuk membahas substansi bidang pendidikan dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan kebijakan strategis lainnya.
10. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota, paling lambat tanggal 3 September 2020

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.10 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim
an

KETUA RAPAT,



Syaiful Huda